

Untuk disampaikan dalam
Ujian Tahap II

**Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara
(Berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun
2018 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 52 Tahun 2017 Tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu)**



Oleh :

**EKO AGUSRIANTO
NPM. 1607700019**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG
2021**

LEMBAR PENGESAHAN

Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara
(Berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 52 Tahun 2017
Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu)

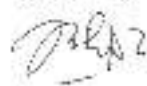
Oleh:

Promotor



Prof. Dr. Kaswani Saibon, M.Ag.

Ko-Promotor



Dr. Sri Hartini Jutrnikowati, M.St.

Mengesahui,

Ketua Program Studi Ilmu Sosial
Program Pascasarjana Universitas Islam Sumatera Utara



Prof. Dr. Bonaventura Ngn., MS.

LEMBAR PERSIKUTUAN

a.n. EKO AGUSRIANTO NPM. 1607700019
Pada Hari/ Tanggal: / Januari 2021

TEM PENGUJI UJIAN TERTUTUP

1. Prof. Dr. Kertwi Saibon, M.Ag (Ketua Promotor)
2. Dr. Sri Hartini Jumikawati, M.Si (Pengiri Ko Promotor)
3. Prof. Dr. Bonaventura Ngw., MS (Pengj.3)
4. Prof. Dr. Agus Sholahuddin, MS (Pengj.1)
5. Prof. dr. Bambang Satriyo, SH., M.Hum (Pengj.4)
6. Dr. Kridawati Saifana, MS (Pengj.2)
7. Dr. Dwi Subarnoko, M.Si (pengj.5)

Berdasarkan SK. Direktur Program
Pascasarjana Unmer Malang
No...../...../2021
Tanggal: Januari 2021

Malang, ... Januari 2021
Ka Prodi Ilmu Sosial,



Prof. Dr. Bonaventura Ngw., MS

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa peserta Program Doktor (S3) Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang.

Nama : Drs. Eko Agusrianto, M.Si
N P K : 16077000019

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Disertasi saya berjudul :

"PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA (Berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pembelan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu)"

Adalah benar – benar hasil karya asli dan bukan hasil plagiat. Apabila di kemudian hari ternyata hal ini terbukti tidak benar, saya bersedia dituntut dan membatalkan gelar Doktor yang telah diperoleh.

Melang, 3 Juni 2021

Drs. Eko Agusrianto, M.Si
16077000019

Catatan :

Surat Pernyataan ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai
Masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

KATA PENGANTAR

(Bismillahirrohmanirrohim)

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Puji Syukur ke-hadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul: **Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (Berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu)** dengan lancar. Untuk itu ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Anwar Sanusi, SE, M.Si, Rektor Universitas Merdeka Malang atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menuntut ilmu di Universitas Merdeka Malang
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang, Ibu. Prof. Dr. Grahita Chandrarin, M.Si., AK.,CA. Beserta seluruh staf atas bimbingan dan perhatiannya
3. Ketua Program Studi Doktor Ilmu Sosial Bapak Prof. Dr. Bonaventura Ngw, MS., beserta Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Sosila Bapak Dr. Dwi Suharmoko yang telah banyak memberikan bimbingan, perhatian dan motivasinya.
4. Prof. Dr. Kasuwi Saiban, M.Ag., selaku Promotor yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan terhadap konstruksi pemikiran yang lebih

sistematis dan telah memberikan berbagai informasi mengenai sumber referensi, sehingga disertasi ini dapat tersusun dan terselesaikan. Semua itu dilakukan dengan penuh kesabaran dan kasih sayang

5. Dr. Sri Hartini Jatmikowati, M.Si., selaku Ko-Promotor, yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi serta masukan-masukan berkenaan dengan tersusunnya disertasi ini dengan baik
6. Bapak/ Ibu Pengajar di Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang: Prof. Dr. H. Budi Siswanto, M.Si, (Alm.), Prof. Dr. Bonaventura Ngw, MS., Prof. Dr. H. Agus Sholahuddin, MS., Prof. Dr. I Made Weni, SH, MS., Prof. Dr. H. Sebastian Koto, M.Si., (Alm.), Dr. Kridawati Sadhana, MS., Dr. Tommy Harianto, Prof. Dr. H. Samsul Wahidin, SH., MS., Dr. Praptining Sukowati, SH., M.Si., Dr. Budhy Prianto, MS., yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan dan arahan-arahan yang berkenaan dengan tersusunnya disertasi ini.
7. Bapak H. Helmi Hasan, SE. (Walikota Bengkulu), yang telah banyak memberikan dukungan dan motivasi dan ijin kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan studi ini.
8. Bapak Ibu Karyawan Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang yang telah banyak membantu dalam urusan administrasi dan mempersiapkan sarana prasarana ujian daring (online)
9. Kedua orang tua, Ayah Alm. Saim Hudisiswanto, Ibu Hj. Rosmini, Istri Dra. Lia Kamalia Heryati, M.Si, dan anak-anak Zahratul Jannah Eko Putri, SIP,M.Si, Syafira Qotrunnada Eko Putri, M.Zaky Mufadhol Eko Putra,

Fiqih Nabila Eko Putri dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan semangat serta kasih sayang untuk menyelesaikan studi ini.

10. Teman-teman Program Doktor Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang angkatan tahun 2016, terutama Bapak Dr. Mohammad Hidayaturrahman, M.I.Kom, Ibu Dr. Nisful Laily, Ibu Dr. Yosita Wisman, Ibu Endang Handayani, Bapak Mahyudin Situmeang, Bapak Dr. El Azhahri, Ibu Dr. Teresia, Ibu Dr. Agung, Ibu Etika, Bapak H. Yahya (alm), Bapak Bobby, Bapak Dodot, Bapak Philipus Agus, Bapak Dr. Lorens, Ibu Prima Dewi, Bapak Dr. Murad dan Bapak Miskat. Terimakasih banyak atas motivasi dan kebersamaan dalam menyelesaikan studi ini.
11. Bapak/ Ibu Kabid, Kasi dan Kasubbag, serta seluruh Pegawai ASN dan PTT Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Bengkulu yang telah banyak membantu dan memberi Support. terimakasih sehingga dapat menyelesaikan studi ini.
12. Bapak/ Ibu informan, Dra. Hj. Noni Yuliesti, (MM Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu), H. Heru Susanto, SE., MM (Kepala Inspektorat Provinsi Bengkulu), Drs. Darpinudin (Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu), Ir. Sorjum Ahyan, M.T (Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Bengkulu), Hasanuddin, S.Sos., M.A.P (Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Biro Organisasi Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu), Alfian Noor, S.stp., M.Si (Kasubag Penilaian Evaluasi Kinerja Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu), Hadi Pramono (Kasubag Umum/ Keuangan Inspektorat Provinsi Bengkulu),

Martarina, ST., MT (Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Penyelenggara Terminal Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu), Karyadi, S.Sos (Staf Perencanaan dan Keuangan Dinas Perhubungan Bengkulu), dan Dheo Kharisma Tanjung, A.Md (Staf Perencanaan Evaluasi dan Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu), terimakasih atas informasi dan data guna terselesaikannya disertasi ini.

Semoga jasa baik bapak/ ibu dan teman-teman di balas Allah SWT, dan disertasi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan semua pihak pada umumnya yang menyenangkan terhadap penelitian.

Malang, 2021
Penulis,

EKO AGUSRIANTO

RINGKASAN

Eko Agusrianto, 2021, Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (Studi Implementasi Kebijakan Berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor: 21 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu), Universitas Merdeka Malang, Promotor: Prof. Dr. Kasuwi Saiban, M.Ag. Ko-Promotor: Dr. Sri Hartini Jatmikowati, M.Si.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Tambahan Penghasilan, Aparatur Sipil Negara.

Kebijakan Berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor: 21 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki perhatian dan keseriusan terhadap persoalan pada keberadaan dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di Provinsi Bengkulu. Untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi pada aparatur pemerintah diperlukan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan, salah satunya adalah dengan pemberian tambahan penghasilan dengan berbagai bentuk dan formulasi.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu serta apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Gubernur tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini meliputi beberapa pihak yang terlibat dalam penyusunan kebijakan, pelaksana atau pelaku kebijakan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Teknik pengumpulan data menggunakan pengamatan langsung (observasi), wawancara mendalam, pendekatan interaktif, studi dokumentasi dan *focus group discussion* (FGD). Data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Saldana yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: kondensasi data (*data condensation*), menyajikan data (*data display*), dan menarik simpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (*selecting*), pengerucutan (*focusing*), penyederhanaan (*simplifying*), peringkasan (*abstracting*), dan transformasi data (*transforming*). Pengujian data dalam penelitian dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu melalui *check, re-check*, dan *crosscheck* terhadap data yang diperoleh dari teori, metodologi, dan persepsi peneliti

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Komunikasi dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, di awal komunikasi dilakukan oleh Gubernur Bengkulu dengan seluruh Organisasi Perangkat daerah (OPD) untuk

mensingkronkan pemahaman berkaitan dengan pentingnya Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sumber daya; Sumber daya pada implementasi Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ini telah tersedia secara memadai, Sumber dana keuangan/ pendanaan, yang disediakan cukup besar. Sumber Daya Material/ Sarana Prasarana, untuk melaksanakan kebijakan tersedia secara memadai, antara lain absen sidik jari (*finger print*), perangkat yang menginstal program (*software*) aplikasi Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) serta gadget atau ponsel yang memungkinkan dapat digunakan untuk aplikasi/ program Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Pada pelaksanaan implementasi Peraturan Gubernur Bengkulu ini para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu sifat, watak dan karakter pelaksana menunjukkan sifat jujur, disiplin dan bertanggung jawab. Namun ada persoalan pada semangat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terutama pada bagian laporan kinerja. Namun ada persoalan pada semangat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terutama pada bagian laporan kinerja. Ada perubahan yang terjadi secara menyeluruh pada kehidupan aparatur pemerintah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, dalam jumlahnya yang cukup besar, sekira 7000 orang. Perubahan yang terjadi merupakan perubahan yang tiba-tiba, tidak perlahan, begitu peraturan gubernur tersebut diberlakukan, maka langsung berubah perilaku dan tindakan para pegawai, namun perubahan yang tiba-tiba tersebut tidak menyebabkan kekacauan, melainkan perubahan yang tertib, bahkan kehidupan yang lebih tertib.

ABSTRACT

Eko Agusrianto ,2021, provision of additional income for state civil servants (The study of Implementation Policy based on the Bengkulu governor regulations number 21 of 2018 about the change of Bengkulu governor regulations number 52 of 2017 about provision of additional income for civil servant in Bengkulu Provincial Government) University of Merdeka Malang, Promotor : Prof. Dr. Kasuwi Saiban, M.Ag. Co-Promotor : Dr. Sri Hartini Jatmikowati, M.Si.

Keywords: Implementation of Policy, Provision of Additional Income, Civil Servat

The policy based on Bengkulu governor regulations number 52 of 2017 about the change of the Bengkulu governor regulations number 52 of 2017 about Provision of additional income for civil servants in Bengkulu Provincial Government shows that Bengkulu Provincial Government has attention and seriousness on issues of existence and well-being of civil servants in Bengkulu Province. In order to overcome the various problems that occur in government apparatus requiring a comprehensive and ongoing handling , one of them is the provision of additional income with various forms and formulations.

The problem of this reasearch is how the implementation of Bengkulu governor regulations number 21 of 2018 about the change of Bengkulu governor regulations number 52 of 2017 about provision of additional income for civil servant in Bengkulu Provincial Government and what are the supporting and inhibiting factors of the implementation of the gornvornor regulation.

This research uses the descriptive qualitative method. Informant in the research includes several informants involved in the policy making, implementer or actor policy from various regional employee organizations. The technique of data collection uses direct observation, detailed interview, interactive approach, , documentation study and focus group discussion (FGD). The data are analyzed by using several steps according to Miles, Huberman and Saldana theory, in analyzing data, there are 3 steps that must be taken : data condensation, data display, drawing conclusion and verification. Data condensation refers to the process of selecting, focusing, simplifiying, abstracting and transforming data. The data verification in this research uses triangulation technique such as check, re-check and cross check to the data obtained from the theory, methodology, and the researcher's perception.

The result of the research shows that communication is done by involving several parties, in the beginning of communication done by Bengkulu gornvornor with all regional employee organizations to synchronize the understanding dealing with the importance of providing additional employee income for civil servants. Resources ; resources on the implementation of governor regulations about

additional employee income is provided adequately, source of financial funds/funding that is provided large enough. Material resource/infrastructure is used to implement the provided policy adequately such as finger print, application software for additional employee income and gadget or handphone that is possible to use application or program additional employee income. In the implementation of Bengkulu provincial government regulations for state civil servants in Bengkulu government environment, characteristics, attitudes and character of the executors showing honest, discipline and responsible. On the other hand, there is a problem with the spirit of doing the job especially in the performance report. There is a change that is going on as a whole on the life of the civil servant government apparatus in the whole Bengkulu Provincial Government, in quite a large number , about 7000 employees. The changes are occurring suddenly, not slowly, but the governor's regulation is enforced , then immediately change the behavior and actions of employees, but the sudden change, doesn't cause chaos, it is orderly change, and even more orderly life.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Teori-Teori	15
2.1.1. Teori Utama	15
2.1.1.1. Implementasi Kebijakan George C. Edward III	15
2.1.2 Teori Pendukung	18
2.1.2.1 Teori Pertukaran Sosial	18
2.1.2.1.1 Teori Pertukaran Peter M. Blau	27
2.1.2.1.2. Teori Pertukaran Richard Emernon	28
2.1.2.2. Teori Struktural Fungsional	30
2.1.2.3. Teori Realitas Sosial	34

2.2. Konsep-Konsep	46
2.2.1. Kebijakan Publik	46
2.2.2. Implementasi Kebijakan Publik	54
2.2.3. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik	60
2.2.3.1. Model Ripley dan Franklin	62
2.2.3.2. Model van Miles dan Van Horn	63
2.2.3.3. Model Jones	67
2.2.4. Pemerintah Daerah.....	67
2.2.5. Otonomi Daerah	71
2.2.6. Konsep Birokrasi	74
2.2.6.1. Pengertian Birokrasi	74
2.2.6.2. Fungsi Birokrasi	76
2.3. Penelitian Terdahulu yang Relevan	77
2.4. Kerangka Konsep Penelitian	81
BAB III METODE PENELITIAN	85
3.1. Pendekatan Penelitian	85
3.2. Fokus Penelitian	86
3.3. Lokasi Penelitian	87
3.4. Sumber Data	88
3.5. Instrumen Penelitian	89
3.6. Teknik Pengumpulan Data	89
3.6.1. Teknik Pengamatan Langsung (Observasi)	89
3.6.2. Teknik Wawancara Mendalam (In Depth Interview).....	90
3.6.3. Penelusuran Dokumen	93

3.7. Teknik Analisa Data	93
3.8. Keabsahan Data	95
3.9. Penyajian Data	96
BAB IV HASIL PENELITIAN	99
4. 1. Gambaran Umum Provinsi Bengkulu	99
4. 2. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)	103
4. 2. 1 Komunikasi dan Koordinasi	114
4. 2. 2 Sumber Daya	116
4. 2. 2. 1 Sumber Daya Manusia	116
4. 2. 2. 2 Sumber Daya Dana/ Anggaran	118
4. 2. 3 Disposisi/ Kecenderungan Pelaksana	121
4. 2. 4 Struktur Birokrasi	129
4. 3. Faktor Pendukung	131
4. 3. 1 Faktor Pendukung Internal	131
4. 3. 1. 1 Penerimaan PNS	131
4. 3. 1. 2 Komitmen Pejabat Daerah	132
4. 3. 2 Faktor Pendukung Eskternal	133
4. 3. 2. 1 Kesiapan Anggaran	133
4. 3. 2. 2 Kesiapan Sistem	134
4. 4 Faktor Penghambat	135
4. 4. 1 Faktor Penghambat Internal	135
4. 4. 1. 1 Tindakan Indisipliner Pegawai	136
4. 4. 2 Faktor Penghambat Eskternal	140
4. 4. 2. 1 Jaringan Data	140
4. 4. 2. 2 Pola Eselonioring	145
4. 4. 2. 3 Tidak Mengukur Kinerja	147
4. 4. 2. 4 Kehadiran Lebih Dominan Dari Penilaian Kinerja	153

4. 4. 2. 5 Tidak Mempertimbangkan Risiko Pekerjaan	155
BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	160
5. 1. Komunikasi Pada Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).....	161
5. 2. Sumber Daya Pada Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai	174
5. 2. 1. Sumber Daya Manusia	175
5. 2. 2. Sumber Daya Keuangan	176
5. 2. 3. Sumber daya Material	177
5. 3 Disposisi Pada Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai	179
5. 4. Struktur Birokrasi Pada Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai ...	180
5. 5. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberian TPP	183
5. 5. 1. Faktor Pendukung	183
5. 5. 1. 1 Faktor Pendukung Internal	183
5. 5. 1. 1. 1 Penerimaan PNS	183
5. 5. 1. 1. 2 Komitmen Pejabat Daerah	184
5. 5. 1. 2 Faktor Pendukung Eksternal	186
5. 5. 1. 2. 1 Kesiapan Anggaran	186
5. 5. 1. 2. 2 Kesiapan Sistem	187
5. 5. 2. Faktor Penghambat	188
5. 5. 2. 1 Faktor Penghambat Internal	189
5. 5. 2. 1. 1 Tindakan Indisipliner PNS	189
5. 5. 2. 2 Faktor Penghambat Eksternal	191
5. 5. 2. 2. 1 Jaringan Data	191
5. 5. 2. 2. 2 Pola Eselonioring	191
5. 5. 2. 2. 3 Tidak Mengukur Kinerja	193
5. 5. 2. 2. 4 Kehadiran Lebih Dominan Dari Penilaian Kinerja	194
5. 5. 2. 2. 5 Tidak Mempertimbangkan Risiko Pekerjaan	195
5. 6 Pemberian TPP Dalam Teori Pertukaran Sosial	196

5. 7. Pemberian TPP Dalam Teori Struktural Fungsional	205
5. 8. Pemberian TPP Dalam Teori Realitas Sosial	210
BAB VI PENUTUP	220
6. 1 Kesimpulan	220
6. 1. 1. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Bengkulu..	220
6. 1. 2. Faktor pendukung dan penghambat Pemberian Tambahan Penghasilan	223
6. 1. 2. 1 Faktor pendukung	223
6. 1. 2. 1. 1 Faktor pendukung Internal	223
6. 1. 2. 1. 2 Faktor pendukung Eksternal	223
6. 1. 2. 2 Faktor penghambat	224
6. 1. 2. 2. 1 Faktor penghambat Internal	224
6. 1. 2. 2. 2 Faktor penghambat Eksternal	224
6. 2. Implikasi Penelitian	224
6. 2. 1 Implikasi Teoritis	225
6. 2. 2 Implikasi Praktis	230
6. 3 Saran	231

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Pemeberian Hukum Disiplin Tahun 2017	6
Tabel 1.2 : Realisasi Keuangan APBD Triwulan III 2017 Pemerintah Provinsi Bengkulu	7
Tabel 1.3 : Data Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Provinsi Bengkulu Tahun 2019	10
Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu Yang Relevan	76
Tabel 3.1 : Informan yang Diwawancarai	88
Tabel 4.1 : Kecamatan/ Desa, Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu	96
Tabel 4.2 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Bengkulu	97
Tabel 4.3 : Anggaran TPP yang bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu ...	125
Tabel 4.4 : Data Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Provinsi Bengkulu Tahun 2019	135
Tabel 4.5 : Data Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Provinsi Bengkulu Tahun 2020	135
Tabel 5.1 : Tabel Existing	200

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III	15
Gambar 2.2 : Metafora Kegagalan Implementasi	56
Gambar 2.3 : Implementasi Kebijakan Model Van Meter dan Van Horn	65
Gambar 2.4 : Kerangka Konseptual Penelitian	80
Gambar 3.1 : Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif Miles Huberman dan Saldana	91
Gambar 4.1 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan jenis Kelamin.....	96
Gambar 4.2 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Umur dan jenis kelamin	97